

2025

PROFIL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Tujuan Penyusunan Profil	3
1.4. Sistematika Penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025	3
BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5
2.1. Sejarah Singkat	5
2.2. Domisili	5
2.3. Maksud dan Tujuan	6
2.4. Kedudukan	6
2.5. Susunan dan Struktur Organisasi	6
2.6. Tugas dan fungsi	7
2.7. Profil Singkat Pejabat Struktural	9
2.8. Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10
2.9. Layanan dan Promosi Perpustakaan	12
2.10. Data Perpustakaan	12
2.11. Data Arsip Statis	14
2.12. Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan ...	16
2.13. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	17
BAB III. PENUTUP	18
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Bulan Mei 2025 10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Data Pegawai Harian Lepas (PHL) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Bulan Mei 2025 11
Tabel 2.3	Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat/Golongan Bulan Mei 2025 11
Tabel 2.4	Rekapitulasi Data Pengelola Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 12
Tabel 2.5	Data Rekapitulasi Perpustakaan Desa/Kelurahan Per Kecamatan 13
Tabel 2.6	Data Rekapitulasi Perpustakaan Sekolah 13
Tabel 2.7	Data Rekapitulasi Perpustakaan Masyarakat (Pojoek Pustaka/Pojoek Baca/Rumah Baca/Taman Baca 14
Tabel 2.8	Data Daftar Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis 14
Tabel 2.9	Layanan Penyediaan Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 16
Tabel 2.10	Rekapitulasi Pejabat Negara dalam Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupate Kepulauan Selayar yang Menyampaikan LHKPN Periodik 2024 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyediaan data dan informasi oleh Pemerintah merupakan upaya yang ditempuh untuk mewujudkan akuntabilitas publik serta membangun citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Hal inilah yang mendasari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar perlu menyusun Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, yang diharapkan dapat menjadi sarana teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran mengenai sejarah singkat berdirinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, domisili, kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, profil singkat pejabat struktural, SDM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Layanan perpustakaan yang dilaksanakan, kegiatan kearsipan dan rekaputulasi Pejabat Negara yang menyampaikan LHKPN.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

1.3. Tujuan Penyusunan Profil

Tujuan penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 adalah untuk menyajikan informasi mengenai keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar serta tersedia data dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.4. Sistematika Penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan gambaran singkat tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Dasar Hukum

Menguraikan secara singkat tentang landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3. Tujuan Penyusunan Profil

Menjelaskan tujuan penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4. Sistematika Penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025

Memberikan gambaran struktur penyusunan Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1. Sejarah Singkat

Menguraikan sejarah singkat berdirinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.2. Domisili

Menguraikan alamat lengkap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021.

2.4. Kedudukan

Menguraikan tentang kedudukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.5. Susunan dan Struktur Organisasi

Menguraikan tentang susunan dan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.6. Tugas dan Fungsi

Menguraikan tentang tugas dan fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.7. Profil Singkat Pejabat Struktural

Menguraikan profil singkat pejabat struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

2.8. Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Menguraikan tentang Sumber Daya Manusia pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

2.9. Layanan dan Promosi Perpustakaan

Menguraikan tentang jenis layanan perpustakaan dan promosi perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

2.10. Data Perpustakaan

Menguraikan tentang perpustakaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar

2.11. Data Arsip Statis

Menguraikan tentang data daftar arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan preservasi dan akses arsip statis di Kabupaten Kepulauan Selayar

2.12. Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan

Menguraikan tentang layanan penyediaan informasi dan layanan kearsipan

2.13. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara

Menguraikan tentang rekapitulasi Pejabat Negara yang berada dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar yang wajib menyampaikan LHKPN.

BAB III. PENUTUP

Memuat kesimpulan

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1. Sejarah Singkat

Perkembangan yang demikian pesatnya membuat masyarakat semakin tak bisa dipisahkan dari informasi, sadar atau tidak manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan informasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi, salah satunya juga adalah dengan membaca.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar didirikan atas bantuan Bapak H. Tenri Abeng, MBA yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan BUMN, dan diresmikan juga oleh beliau pada tanggal 26 Juni 1999, dan diperdakan tanggal 7 Juli 1999 Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum. Kantor Perpustakaan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 dengan gedung berlantai 2 (dua) terletak di pusat Benteng ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar. Diawal berdirinya Kantor Perpustakaan adalah sebuah Kantor yang bergabung dengan Arsip Daerah pada waktu itu, dengan adanya gedung sendiri Perpustakaan, maka sejak itu perpustakaan berubah nama dari Perpustakaan Anak Kukang menjadi Perpustakaan Umum Daerah, namun Tahun 2006 Kantor Perpustakaan berada dibawah naungan Diknas dan berubah menjadi UPTD Perpustakaan, dan Tahun 2009 Kantor Perpustakaan berubah nama lagi menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip dan kembali berdiri sendiri dimana langsung bertanggungjawab kepada Bupati. Kemudian pada Tahun 2017 berubah nama menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar. Nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak berubah sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2020 sampai saat ini.

2.2 Domisili

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar berdomisili di Benteng ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan kode pos 92812, URL Website: <http://perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id>, E-mail: perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com

2.3. Maksud dan Tujuan

Kelembagaan dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan diatur pada Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 134 Tahun 2021 Bab II Maksud dan Tujuan Pasal 2 berbunyi :

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi serta tata kerja pada Dinas.

Pasal 3 berbunyi :

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini yaitu untuk menjabarkan Tugas dan Fungsi jabatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Daerah pada Dinas.

2.4. Kedudukan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

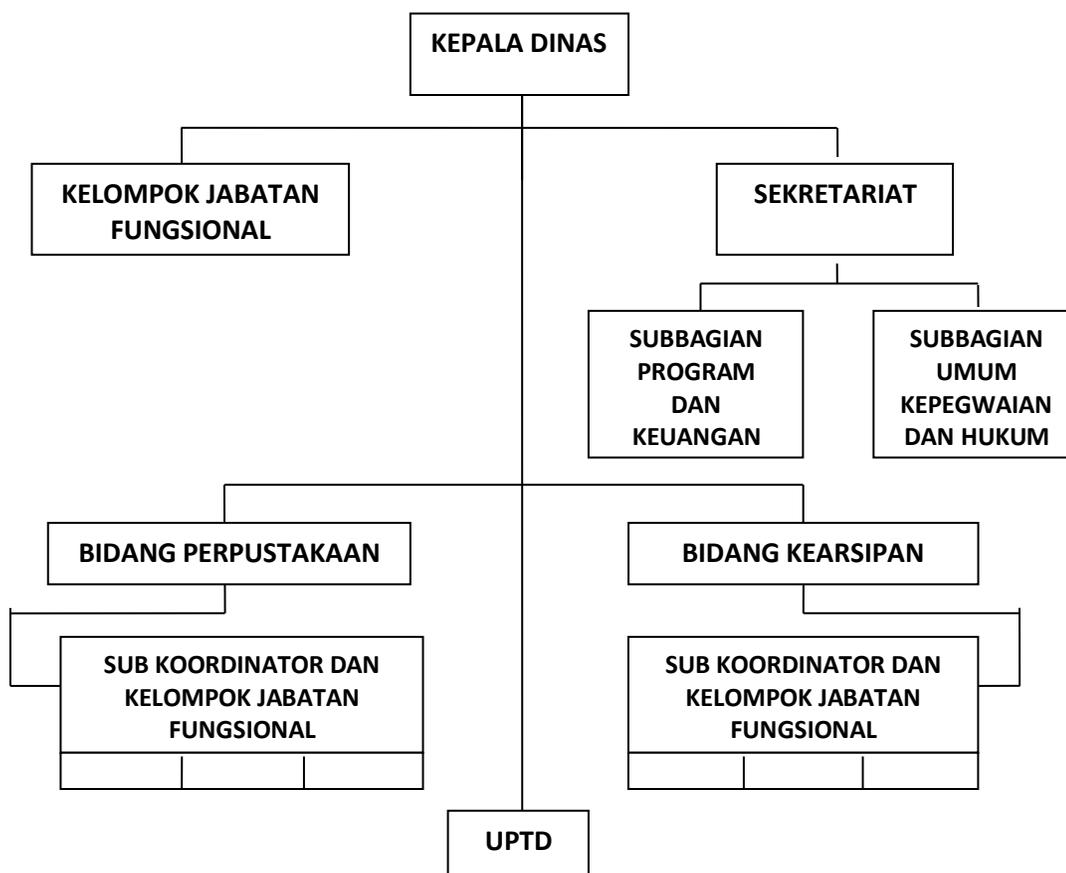
2.5. Susunan dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- c. Bidang Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



2.6. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai **Tugas** membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai **Fungsi** :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program dan anggaran Dinas;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan asset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil Negara lingkup Dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas :

1. Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan umum, pengelolaan arsip, persuratan, kerumah tanggaan, pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

3. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka Kepala Bidang Perpustakaan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang perpustakaan; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perpustakaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Kearsipan mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kearsipan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan Fungsinya.

Bidang Kearsipan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7. Profil Singkat Pejabat Struktural

Profil singkat pejabat struktural pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

1. Kepala Dinas

Nama : H. Salahuddin, S.Sos
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c

2. Sekretaris

Nama : -
Pangkat/ Golongan : -

3. Kepala Bidang Perpustakaan

Nama : Andi Herliati, S.P, M.M
Pangkat/ Golongan : Pembina, IV/a

4. Kepala Bidang Kearsipan

Nama : Andi Citrawati, S.T

Pangkat/ Golongan : Pembina, IV/a

5. Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Nama : Raden Rachmawati, A.Md,Pi

Pangkat/ Golongan : Penata, III/c

6. Kepala Subbagian Program dan Keuangan

Nama : Fakhrudin, S.E

Pangkat/ Golongan : Penata Muda Tk.I, III/b

2.8. Sumber Daya Manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki pegawai sebanyak 48 Orang yaitu 20 orang PNS dan 28 orang PHL (keadaan bulan Mei 2025).

Rekapitulasi Data Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Bulan : Mei 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	S3	1 orang	-	1 orang
2.	S2	-	1 orang	1 orang
3.	S1	6 orang	6 orang	12 orang
4.	D3	-	4 orang	4 orang
5.	D2	-	2 orang	2 orang
6.	SLTA	-	-	-
7.	SLTP	-	-	-
8.	SD	-	-	-
	Jumlah	7 orang	13 orang	20 orang

Tabel 2.2
Rekapitulasi Data Pegawai Harian Lepas (PHL)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Bulan : Mei 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	S2	-	-	-
2.	S1	1 orang	10 orang	11 orang
3.	D3	-	-	-
4.	D2	-	3 orang	3 orang
5.	SLTA	4 orang	6 orang	10 orang
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	1 orang	-	1 orang
	Jumlah	6 orang	19 orang	25 orang

3. Rekapitulasi Data Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pangkat/Golongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Rekapitulasi Data Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Pangkat/Golongan
Bulan : Mei 2025

No.	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda/ IV/c	1 orang	1 orang	2 orang
2.	Pembina Tk. I/ IV/b	-	-	-
3.	Pembina/ IV/a	1 orang	2 orang	3 orang
4.	Penata Tk. I/ III/d	3 orang	3 orang	6 orang
5.	Penata/ III/c	2 orang	2 orang	4 orang
6.	Penata Muda Tk. I/ III/b	-	1 orang	1 orang
7.	Penata Muda/ III/a	-	3 orang	3 orang
8.	Pengatur Tk. I/ II/d	-	1 orang	1 orang
9.	Pengatur/ II/c	-	-	-
	Jumlah	7 orang	13 orang	20 orang

Rekapitulasi Data Pengelola Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Data Pengelola Perpustakaan Pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	S2	-	1 orang	1 orang	1 orang kualifikasi Non Perpustakaan
2.	S1	1 orang	10 orang	11 orang	5 orang kualifikasi Perpustakaan (1 org laki-laki dan 4 org perempuan), 6 orang kualifikasi Non Perpustakaan (1 org laki-laki, 5 org perempuan)
3.	D3	-	-	-	
4.	D2	-	4 orang	4 orang	4 orang kualifikasi perpustakaan
5.	SLTA	1 orang	2 orang	3 orang	3 orang kualifikasi Non Perpustakaan
	Jumlah	2 orang	17 orang	19 orang	9 org kualifikasi Perpustakaan dan 10 org kualifikasi Non Perpustakaan

2.9. Layanan dan Promosi Perpustakaan

a. Layanan Perpustakaan

Kegiatan layanan perpustakaan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain

1. Layanan Sirkulasi
2. Layanan Referensi
3. Layanan Perpustakaan Keliling (Mobil Pustaka dan Kapal Pustaka)
4. Layanan Titip Pinjam Bahan Pustaka
5. Layanan Keanggotaan Perpustakaan
6. Layanan Ruang Baca dan Bermain Anak

b. Promosi Perpustakaan

Kegiatan promosi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

1. Pameran perpustakaan
2. Kerjasama dengan pihak ketiga
3. Menyebarkan brosur, kalender, paper bag, dan banner.

2.10. Data Perpustakaan

a. Perpustakaan Desa/Kelurahan

Perpustakaan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 88 Perpustakaan Desa/Kelurahan.

Data Rekapitulasi Perpustakaan Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Data Rekapitulasi Perpustakaan Desa/Kelurahan
Per Kecamatan

No.	Lokasi	Jumlah Perpustakaan Desa/Kelurahan	Keterangan
1.	Kecamatan Bontomatene	12	
2.	Kecamatan Buki	7	
3.	Kecamatan Bontomanai	10	
4.	Kecamatan Benteng	3	
5.	Kecamatan Bontoharu	8	
6.	Kecamatan Bontosikuyu	12	
7.	Kecamatan Pasimasunggu	7	
8.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	6	
9.	Kecamatan Pasilambena	6	
10.	Kecamatan Pasimarannu	8	
11.	Kecamatan Taka Bonerate	9	
	Jumlah	88	

b. Perpustakaan Sekolah

Perpustakaan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 233 sekolah (SD 153, SLTP 61, SLTA 19).

Data Rekapitulasi Perpustakaan Sekolah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Data Rekapitulasi Perpustakaan Sekolah

No.	Lokasi	Perpustakaan Sekolah				Jumlah Perpustakaan
		SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	
1.	Kec. Bontomatene	17	6	2		25
2.	Kec. Buki	14	5	1		20
3.	Kec. Bontomanai	22	8	2		32
4.	Kec. Benteng	10	5	5		20
5.	Kec. Bontoharu	16	5	2		23
6.	Kec. Bontosikuyu	22	8	2		32
7.	Kec. Pasimasunggu	10	5	1		16
8.	Kec. Pasimasunggu Timur	9	4	2		15
9.	Kec. Pasilambena	10	4	1		15
10.	Kec. Pasimarannu	10	4	1		15
11.	Kec. Taka Bonerate	13	7	-		20
	Jumlah	153	61	19		233

c. Perpustakaan Masyarakat (Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/
Taman Baca)

Perpustakaan Masyarakat (Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/Taman Baca) di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 27 Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/Taman Baca.

Data Rekapitulasi Perpustakaan Masyarakat (Pojok Pustaka/Pojok Baca/Rumah Baca/Taman Baca) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Data Rekapitulasi Perpustakaan Masyarakat
(Pojoek Pustaka/Pojoek Baca/Rumah Baca/Taman Baca)

No.	Lokasi	Jumlah Pojoek Pustaka/Pojoek Baca/Rumah Baca/Taman Baca	Ket.
1.	Kecamatan Bontomatene	-	
2.	Kecamatan Buki	5	
3.	Kecamatan Bontomanai	2	
4.	Kecamatan Benteng	10	
5.	Kecamatan Bontoharu	9	
6.	Kecamatan Bontosikuyu	1	
7.	Kecamatan Pasimasunggu	-	
8.	Kecamatan Pasimasunggu Timur	-	
9.	Kecamatan Pasilambena	-	
10.	Kecamatan Pasimarannu	-	
11.	Kecamatan Taka Bonerate	-	
	Jumlah	27	

2.11. Data Arsip Statis

Data arsip statis adalah data arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan dan telah diserahkan ke lembaga kearsipan karena tidak lagi digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi. Data ini telah diverifikasi dan dipermanenkan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan lainnya.

Dokumen-dokumen pemerintahan lama, naskah kuno, foto-foto bersejarah, dan data pemilu merupakan contoh arsip statis.

Tabel 2.8
Data Daftar Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan
Preservasi dan Akses Arsip Statis

NO	NAMA OPD	URAIAN MASALAH	TAHUN	JUMLAH
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang No. 600/16/IV/2024/DIS.PUTR tentang standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara, rumah negara, dan pagar bangunan gedung negara atau rumah negara triwulan I tahun 2024	2024	1 Exp
		Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang No. 600/21/V/2024/DIS.PUTR tentang standar pelayanan pada dinas pekerjaan umum dan tata ruang	2024	1 Exp
		Peraturan Bupati No. 4 tahun 2024 tentang RDTR kawasan perkotaan benteng	2024	1 Exp
		Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang No. 600/03.a/I/2024/DIS.PUTR tentang penunjukan tenaga pendata standarharga satuan tertinggi (SHST) bangunan gedung negara kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2024	2024	1 Exp

2	KECAMATAN BUKI	Profil Kecamatan Buki tahun 2023	2023	1	Exp
		Sk pembedaan tim percepatan stunting tahun 2024	2024	1	Exp
		Sk pembentukan tim panitia HUT ke 79 tahun 2024	2024	1	Exp
3	KECAMATAN BONTOMANAI	Peta Monografi kecamatan bontomanai		1	Exp
		Struktur Organisasi kantor kecamatan bontomanai		1	Exp
		Pemerintahan kabupaten kepulauan selayar kecamatan bontomanai tentang peta kecamatan bontomanai tahun 2023	2023	1	Exp
4	KECAMATAN BONTOHARU	Profil Kecamatan Bontoharu tahun 2021	2021	1	Exp
		Profil Kecamatan Bontoharu tahun 2022	2022	1	Exp
		Profil Kecamatan Bontoharu tahun 2023	2023	1	Exp
5	KECAMATAN BONTOMATENE	Profil Kecamatan Bontomatene tahun 2023	2023	1	Exp
		Rencana strategis kecamatan bontomatene tahun 2021-2026	2021-2026	1	Exp
6	KELURAHAN BATANGMATA	Struktur organisasi kelurahan batangmata kecamatan bontomatene		1	Exp
		Laporan bulanan mutasi penduduk kelurahan batangmata kecamatan bontomatene tahun 2024	2024	1	Exp
		Surat keputusan camat bontomatene No. 6 tahun 2024 tentang pengangkatan petugas kemasyarakatan, dan petugas administrasi kelurahan (ketua rukun warga dan ketua rukun tetangga) kelurahan batangmata tahun 2024	2024	1	Exp
		Surat keputusan camat bontomatene no. 5 tahun 2024 tentang pengangkatan kepala lingkungan di kelurahan batangmata tahun 2024	2024	1	Exp
7	DESA PARAK	Keputusan Kepala Desa Parak No. 1 Tahun 2024 tentang pengangkatan desa tahun anggaran 2024	2024	1	Exp
		Profil Desa Parak Tahun 2024	2024	1	Exp
8	DESA POLEBUNGING	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar		1	Exp
		Keputusan Kepala Desa Polebunging No. 1 Tahun 2024 tentang pengangkatan perangkat desa desa polebunging kecamatan bontomanai tahun anggaran 2024	2024	1	Exp
		Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan desa polebunging tahun 2023	2023	1	Exp

		Keputusan Kepala Desa Polebunging No. 4 Tahun 2024 tentang pengangkatan RK tahun anggaran 2024	2024	1	Exp
		Keputusan Kepala Desa Polebunging No. 5 Tahun 2024 tentang pengangkatan RT tahun anggaran 2024	2024	1	Exp
		Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Bontomanai Desa Polebunging surat putusan kepala desa polebunging no. 7 tahun 2020 tentang pengangkatan RT	2020	1	Exp
		Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar Kecamatan Bontomanai Desa Polebunging Surat Keputusan Kepala Desa Polebunging No. 6 Tahun 2020 tentang pengangkatan RK kepala desa polebunging	2020	1	Exp
9	DESA BONTOSUNGGU	Profil Desa Bontosunggu Tahun 2023	2023	1	Exp
		Profil Desa dan Kelurahan Bontosunggu Tahun 2024	2024	1	Exp
JUMLAH					30 ARSIP

2.12. Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan

Layanan Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan akses informasi kearsipan kepada publik, baik secara langsung maupun melalui sistem informasi kearsipan, seperti SIKN (Sistem Informasi Kearsipan Nasional) dan JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional). Layanan ini mencakup penyediaan informasi arsip dinamis dan statis, serta layanan terkait lainnya seperti konsultasi kearsipan dan perbaikan arsip.

Layanan Kearsipan:

Layanan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti:

- Pengolahan Arsip: Kegiatan untuk mengklasifikasi, mengindex, dan menyimpan arsip.
- Penyimpanan Arsip: Penyediaan tempat penyimpanan arsip yang aman dan sesuai dengan standar kearsipan.
- Alih Media: Proses perubahan format arsip dari media tradisional (kertas) ke media digital.
- Perbaikan Arsip: Layanan untuk memperbaiki arsip yang mengalami kerusakan akibat bencana atau faktor usia.
- Konsultasi Kearsipan: Layanan untuk memberikan bimbingan dan konsultasi terkait pengelolaan arsip.

Tabel 2.9

Layanan Penyediaan Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Aplikasi Live Srikandi diluncurkan oleh Bapak Wakil Bupati dan dilaksanakan Bimtek Aplikasi Srikandi yang di ikuti oleh 38 OPD)	1 Pengguna

2.13. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Pejabat Negara yang berada dalam Lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar yang wajib menyampaikan LHKPN Tahun 2024 sebanyak 5 orang.

Rekapitulasi Pejabat Negara yang berada dalam lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar yang wajib menyampaikan LHKPN Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Rekapitulasi Pejabat Negara dalam Lingkup
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar
Yang Wajib Menyampaikan LHKPN Tahun 2024

No.	Eselon	Jumlah	Periode Pelaporan	Keterangan
1	Eselon II-B	1 orang	2024	
2.	Eselon III-A	1 orang	2024	
3.	Eselon III-B	2 orang	2024	
4.	Bendahara Pengeluaran	1 orang	2024	
	Jumlah	5 orang		

BAB III PENUTUP

Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 ini diharapkan menghasilkan data statistik yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Tersusunnya Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran singkat tentang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.